

**Jurnal**

ISSN 1412 - 4246

# **Ilmu Administrasi**

Volume 4 Nomor 1 Juni 2008

## **Kepemimpinan dan Kebijakan Publik**

**Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara**  
Johanes Basuki

**Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan di Kawasan Timur Indonesia**

Hamka dan Burhanuddin (Ketua Peneliti)

Lukman Samboteng, Sulaeman Fattah, Muh. Idris, Wahidin, Muh. Basri (Anggota Peneliti)

**Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

Istyadi Insani

**Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadasung) di Daerah Kabupaten/Kota**

M. Ikhsan

***Social Security System: Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Rakyat***

Augustin Rina Herawati

**STIA LAN Press**

ISSN 1412 - 4246

**Jurnal**  
**Ilmu Administrasi**

Volume 4 Nomor 1 Juni 2008

**SUSUNAN REDAKSI**

**Penanggung Jawab:**

Prof. Dr. Johanes Basuki, M.Psi

**Pemimpin Redaksi:**

Drs. Hamka, MA.

**Sekretaris:**

Drs. Sukadarto, SH, MM

**Mitra Bestari:**

Prof. Dr. Ginanjar Kartasasmita

**Dewan Penyunting**

**Ketua:**

Dr. Muhammad Taufiq, DEA

**Penyunting Penyelia:**

Prof. Dr. Mustopadidjaja AR, MPIA

Prof. A. Aziz Sanapiah, MPA

Prof. Dr. Said Zainal Abidin, MPIA

**Penyunting Pelaksana:**

Prof. Dr. Juni Pranoto, M.Pd

Drs. Hardijanto, M.Pd

Siti Noor Amani, SE, MM

Sugiyanto, SH, MPA

**Penyunting Tamu:**

Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, MPA

**Sekretariat:**

Dra. Liliek Suprihatin, M.Si, Rudiart Komara, S.IP, M.Com,

Neneng Sri Rahayu, ST, M.Si

**ALAMAT REDAKSI:**

Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Lembaga Administrasi Negara Lantai 2

Jalan Administrasi II Pejompongan

Jakarta 10260

**Telp:** 0215722726 **Fax:** 0215732862 **E-mail:** meniknoviati@yahoo.com.

**Website:** www.stialan.ac.id

**Isi Nomor Ini**

## **Pengantar**

### **Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara**

Johanes Basuki

### **Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan di Kawasan Timur Indonesia**

Hamka dan Burhanuddin (Ketua Peneliti)

Lukman Samboteng, Sulaeman Fattah, Muh. Idris, Wahidin, Muh. Basri (Anggota Peneliti)

### **Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

Istyadi Insani

### **Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadasung) di Daerah Kabupaten/Kota**

M. Ikhsan

### ***Social Security System: Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Rakyat***

Augustin Rina Herawati

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang terkait dengan pengembangan ilmu dan praktek administrasi baik administrasi negara maupun administrasi niaga. Tulisan harus asli merupakan hasil penelitian, refleksi, pemikiran, pendapat, dan resensi buku yang disertai acuan/pustaka sebagai tulisan ilmiah dan belum pernah dipublikasikan pada penerbitan lain. Tulisan diketik satu spasi maksimum 30 halaman A4, dikirim dalam bentuk *print-out* atau CD ke alamat redaksi atau melalui *Email*. Tulisan yang tidak dimuat dalam dua nomor penerbitan berturut-turut dapat diterbitkan di jurnal lain dengan pemberitahuan kepada kami. Keputusan Redaksi tidak dapat diganggu gugat.

## Pengantar

Tema yang dipilih pada penerbitan ini mempunyai makna tersendiri khususnya bila dikaitkan dengan isu kepemimpinan nasional dan kebijakan publik. Kepemimpinan dan kebijakan publik selalu menarik untuk didiskusikan. Kepemimpinan pada dasarnya terkait dengan efektivitas pengelolaan organisasi. Berbagai kajian menunjukkan pentingnya kepemimpinan efektif yang mampu melakukan perubahan. *Johanes Basuki* dalam uraiannya menyatakan bahwa paradigma baru kepemimpinan aparatur negara adalah kepemimpinan transformasional, transaksional, resonan, dan melayani masyarakat. Pada era persaingan, seorang pemimpin harus mempunyai visi yang kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan untuk mencapai kemakmuran dan keberhasilan.

Kebijakan merupakan instrumen sekaligus sebagai acuan untuk mencapai visi organisasi pemerintah. Salah satu tugas utama pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan publik. Dalam kajian yang dilakukan oleh *Hamka dkk* menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih banyak merumuskan kebijakan untuk kepentingan birokrasi. Selain itu, dalam perumusan kebijakan tingkat keterlibatan masyarakat masih rendah. Pemerintah daerah seharusnya lebih banyak merumuskan kebijakan yang terkait fungsi pengaturan dan pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat.

Kebijakan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah berhasil dilaksanakan dengan berbagai persoalan. Sebagaimana pernyataan *M. Ikhsan*, yang menarik dari pelaksanaan Pilkada adalah orientasi menuju konsolidasi demokrasi daripada politik atau kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 92 persen dari seluruh daerah yang telah melaksanakan Pilkada sejak bulan Juni 2005 telah berhasil melaksanakan Pilkada dengan lancar dengan tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan.

Efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari dinamika lingkungan, khususnya pasca bencana Tsunami tahun 2004 dan pasca konflik. Implementasi kebijakan, menurut *Istyadi*, dihadapkan pada masalah tindaklanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai aspek dan alasan teknis. Beberapa langkah konkrit, antara lain sosialisasi UU tersebut secara intensif, komitmen penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan serta koordinasi antar instansi terkait.

Sistem jaminan sosial dibentuk berdasarkan ideologi, kondisi ekonomi, dan sistem politik negara yang bersangkutan. *Augustin* menegaskan bahwa dalam mendesain mekanisme jaminan sosial, penentuan tipe sistem, apakah akan berbentuk asuransi sosial atau bantuan sosial, sangat tergantung pada tujuan dan isi dari sistem tersebut, serta perubahan-perubahan historis dalam lingkungan negara yang bersangkutan.

Jakarta, Juni 2008  
Redaksi

